

# DINAMIKA PENETAPAN CALON LEGISLATIF DALAM PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

Oleh  
Husniyatul Ramadhani  
NIM. 2205040004

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan. Instrumen penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah kebijakan *afirmatif* keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, yang bertujuan mengurangi ketimpangan gender dalam politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon. Penyelenggaraan Pemilu 2024 muncul permasalahan perbedaan penafsiran mengenai mekanisme penghitungan persentase keterwakilan Perempuan di KPU Kabupaten Bintan, khususnya akibat penerapan pembulatan ke bawah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Permasalahan tersebut tercermin dalam penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Bintan pada Daerah Pemilihan Bintan 3, di mana KPU menetapkan partai politik dengan keterwakilan perempuan sebesar 28,57% tetap memenuhi syarat pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penetapan calon anggota legislatif oleh KPU Kabupaten Bintan dalam memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 serta mengkaji penafsiran hukum KPU terhadap syarat minimal 30% keterwakilan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembulatan ke bawah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang menegaskan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan harus dilakukan secara nyata tanpa pengurangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran tersebut melemahkan kepastian hukum, mengurangi efektivitas kebijakan *afirmasi* perempuan, serta berdampak pada kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: Pemilu, Keterwakilan Perempuan, Penafsiran Hukum.

***The Dynamics of Legislative Candidate Determination in Fulfilling Women's Representation in the 2024 General Election by the General Election Commission of Bintan Regency***

**By  
Husniyatul Ramadhani  
NIM. 2205040004**

***ABSTRACT***

*General elections are the primary means of realizing people's sovereignty in a democratic system based on the principles of justice and equality. An important instrument in the implementation of elections is the affirmative policy of women's representation in legislative nominations, which aims to reduce gender inequality in politics. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections explicitly requires women's representation of at least 30% in the list of prospective candidates. However, in the implementation of the 2024 Election, problems arose in different interpretations regarding the mechanism for calculating the percentage of women's representation, particularly due to the application of rounding down as stipulated in KPU Regulation Number 10 of 2023. This problem was reflected in the determination of the Final Candidate List for the Bintan Regency DPRD in the Bintan 3 Electoral District, where the KPU determined that political parties with 28.57% women's representation still met the nomination requirements. This study aims to analyze the dynamics of the determination of legislative candidates by the Bintan Regency General Elections Commission (KPU) in fulfilling the requirements for women's representation in the 2024 General Election and to examine the KPU's legal interpretation of the minimum requirement of 30% women's representation. The research method used is the normative-empirical legal method with a statutory, conceptual, and case study approach. The results of the study indicate that the application of rounding down is not in line with Law Number 7 of 2017 and Supreme Court Decision Number 24 P/HUM/2023 which emphasizes that the fulfillment of women's representation quota must be carried out in real terms without reduction. This study concludes that these differences in interpretation weaken legal certainty, reduce the effectiveness of women's affirmative policies, and impact the quality of democracy and the integrity of election administration.*

*Keywords: General Election, Women's Representation, Legal Interpretation*